ABSTRAK

JENIS PRODUK HUKUM	Peraturan Bupati
JUDUL	Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2027
NO. PERATURAN	1
TGL PENGESAHAN	20 Januari 2025
NO. BD	1
NO TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	9 Pasal, V BAB
RIWAYAT/STATUS	-
JUMLAH HALAMAN	8 Halaman Batang Tubuh 77 Halaman Lampiran
PENJELASAN	-
PERATURAN PELAKSANA	-
MATERI YANG DIATUR	1. Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana Kontingensi Banjir, 2. Pengumpulan data dan pembaruan data pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi, 3. Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat, 4. Penyusunan dokumen rencana Kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana Kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut, 5. Penandatanganan komitmen dan public consultation atas hasil rumusan rencana Kontingensi: 6. Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana Kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (multi-stakeholdersl melalui public consultation yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulalgan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta Lembaga Internasional dalam Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangal Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2O12 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

BERLAKU	20 Januari 2025
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id